

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Kamis 19 Desember 2024
Wilayah	Provinsi Sulawesi Selatan



Dana Desa Sulsel 2025 Rp2,02 T

Dana Desa Sulsel 2025 Rp2,02 T

MAKASSAR, UPEKS— Alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2025 mencapai Rp2,02 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi mengatakan, peningkatan alokasi dana desa ini dikarenakan nilai anggaran dan jumlah desa di Sulsel yang bertambah. "Dana desa itu dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis dan faktor lainnya. Sehingga pemerataan desa turut memengaruhi alokasi dana," katanya, kemarin.

ALOKASI DANA DESA SULSEL 2025:

- 1 Alokasi Dana Desa untuk Sulsel 2025 Rp2,02 triliun atau meningkat 0,11% jika dibandingkan tahun sebelumnya.
- 2 Peningkatan alokasi dana desa ini dikarenakan nilai anggaran dan jumlah desa di Sulsel yang bertambah.
- 3 Alokasi dana desa dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis dan faktor lainnya.
- 4 Pemanfaatan mengacu UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, prioritas utama seperti penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan SDM.
- 5 Termasuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis.

Menurut Supendi, untuk pemanfaatan dana desa akan mengacu Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Dimana

dana desa akan dialokasikan untuk prioritas utama, seperti penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan

pangan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Termasuk, salah satunya untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis. Program ini diharapkan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memastikan dana desa memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar.

Supendi juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa secara lokal. Ia mengimbau agar pembelanjaan dilakukan di desa atau kecamatan tempat dana itu dialokasikan. "Jika tidak memungkinkan, maka sebisa mungkin di kabupaten atau pro-

vinsi yang sama. Barang dari luar provinsi, apalagi luar negeri, harus dihindari agar kandungan lokal tetap tinggi dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," terangnya.

Dengan kebijakan ini, lanjut Supendi, pemerintah berharap alokasi dana desa dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya meminta semua daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah, yang diharapkan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (eky/rif)